

**KETIMPANGAN WILAYAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

FARIDA ALIYATUL ASY'ARIATI



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

ABSTRAK

KETIMPANGAN WILAYAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Farida Aliyatul Asy'ariati

Tujuan penelitian untuk mengetahui ketimpangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebelum dan selama pandemi covid-19. Data yang digunakan merupakan terdiri dari data tahun 2016-2021 dan 13 kabupaten dan 2 kota. Variabel yang digunakan adalah ketimpangan wilayah, PDRB perkapita, dan jumlah penduduk miskin. Hasil menunjukkan bahwa Indeks Williamson kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebelum pandemic covid-19 mengalami peningkatan. Indeks Williamson kabupaten/kota di Provinsi Lampung sepanjang periode tahun 2016-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nilai indeks pada tahun 2016 sebesar 0,26 meningkat menjadi 0,28 di tahun 2017, 2018 dan 2019 mencapai 0,32, sedangkan ketimpangan wilayah tahun 2020 juga mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 0,27. Secara teoritis, angka kesenjangan tersebut masih berada pada tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah yang rendah (kurang dari 0,35).

Kata Kunci: Indeks Williamson, Ketimpangan Wilayah, dan Lampung.

ABSTRACT

REGIONAL INEQUALITY BETWEEN DISTRICT/CITY IN LAMPUNG PROVINCE

By

Farida Aliyatul Asy'ariati

The purpose of the study was to determine the regional inequality of districts/cities in Lampung Province before and during the COVID-19 pandemic. The data used consists of data from 2016-2021 and 13 districts and 2 cities. The variables used are regional inequality, GRDP per capita, and the number of poor people. The results show that the Williamson Index of districts/cities in Lampung Province before the COVID-19 pandemic experienced an increase. The Williamson index of districts/cities in Lampung Province throughout the 2016-2019 period has increased every year. The index value in 2016 was 0.26, increasing to 0.28 in 2017, 2018 and 2019 reaching 0.32, while regional inequality in 2020 also increased in 2021 to 0.27. Theoretically, the gap rate is still at a low level of economic disparity between regions (less than 0.35).

Keywords: Lampung, Regional Inequality, and Williamson.

**KETIMPANGAN WILAYAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
LAMPUNG**

Oleh
FARIDA ALIYATUL ASY'ARIATI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **KETIMPANGAN WILAYAH ANTAR
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Farida Aliyatul Asy'ariati**

No. Induk Mahasiswa : **1511021021**

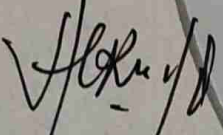
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**




Komisi Pembimbing I

Komisi Pembimbing II


Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.
NIP. 19770212 2006041001


Asih Murwiati, S.E., M.E.
NIP. 197404102008122001

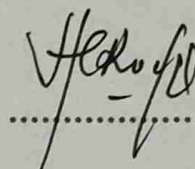
MENGETAHUI
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan


Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.
NIP. 19631215198903200

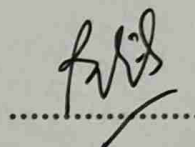
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

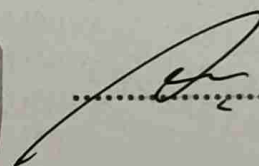
Ketua : **Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.**



Penguji I : **Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.Si.**



Penguji II : **Asih Murwiati, S.E., M.E.**



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **25 April 2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Farida Aliyatul Asy'ariati

NPM : 1511021021

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 April 2022

Penulis



Farida Aliyatul Asy'ariati
Farida Aliyatul Asy'ariati

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Farida Aliyatul Asy'ariati. Penulis dilahirkan di Raman Aji pada tanggal 21 November 1997, sebagai anak kedua dari dua bersaudara oleh pasangan Bapak Drs. Ali Murtopo dan Ibu Wiwik Indiarti.

Penulis memulai pendidikannya di Taman Kanak-kanak (TK) LPM Raman Aji diselesaikan pada tahun 2003. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Raman Aji diselesaikan pada tahun 2009. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Raman Utara diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Raman Utara dan diselesaikan pada tahun 2015.

Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung di jurusan Ekonomi Pembangunan melalui jalur SNMPTN pada tahun 2015. Adapun kegiatan organisasi yang pernah diikuti yaitu sebagai Staff Bidang Keilmuan ROIS FEB UNILA periode 2015/2016, anggota Aktif HIMEPA FEB UNILA periode 2015/2016.

Pada tahun 2017 penulis mengikuti kegiatan KKL (Kuliah Kunjung Lapangan) di Bursa Efek Indonesia, Bappenas, dan Kementerian Perdagangan. Pada tahun 2018 penulis juga pernah melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT yang membimbingku hingga saat ini, karya ini kupersembahkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Drs. Ali Murtopo dan Ibu Wiwik Indiarti yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayang, dukungan serta doa yang tiada henti untuk kesuksesanku. Terima kasih tak terhingga kepada Ayah dan ibu karena telah merawat, membesarkan, dan mendidikku tanpa lelah.

Kakakku A. Miftahul Ash-shiddiqy, S.Pd. yang selalu memberikan motivasi, semangat, serta dukungan tiada henti disetiap prosesnya.

Suamiku Mohammad Nurohman, S.Pd. yang selalu memberikan motivasi, senyuman penyemangat, perhatian serta doa yang tulus dan ikhlas disetiap prosesnya.

Seluruh keluarga, sahabat dan teman-temanku yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan di setiap prosesnya.

Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan motivasi, ilmu yang bermanfaat serta nasihat yang sangat membantu dan membangun.

Almamater tercinta, Universitas Lampung.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al Insyirah:5)

“...Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal (kepada-Nya).”

(Q.S. Ali ‘Imran:159)

“If Allah is making you wait, then be prepared to receive more than what you asked for.”

(Farida Aliyatul Asy’ariati)

SANWACANA

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan
2. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan selaku dosen pembimbing utama atas kesediaan waktunya memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, motivasi dan saran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Asih Murwiati, S.E., M.E. selaku dosen pembimbing pendamping atas kesediaan waktunya memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, motivasi dan saran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dr. Arivina Ratih Yulihar Taher, S.E., M.Si. selaku dosen penguji I yang tidak hanya menguji namun menjadi pengarah dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Tiara Nirmala, S.E., M.Si. selaku dosen pembahas yang telah memberikan pelajaran, bimbingan, masukan dan perhatian yang sangat berharga bagi penulis.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Universitas Lampung.
8. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Drs. Ali Murtopo dan Ibu Wiwik Indiarti yang selalu mendoakan dan mendukung dengan tulus dan ikhlas.
9. Kakakku A. Miftahul Ash-shiddiqy, S.Pd. terimakasih atas dukungan dan doa yang tulus untuk keberhasilanku.
10. Suamiku Mohammad Nurohman, S.Pd. yang selalu mendoakan dan mendukung dengan tulus dan ikhlas untuk keberhasilanku.
11. Sahabat sejak awal perkuliahan, Nia, Raffi, Umar, Ani, Dedy, Nova, Yuli, Pina, Isnaini, Kiki, Santi, Sartika, dan Eri. Terima kasih sudah selalu ada dalam suka maupun duka dan untuk semua bantuan serta pertolongannya, semoga kita selalu sukses.
12. Sahabat-sahabat Kosan Executive Class, Putri, Marsa, Marfiana, Neva, Loulita, Dewi dan Shabrine. Terimakasih telah menemani selama perkuliahan sukses untuk kita semua.
13. Pelanggan setia Mbak Wiwik Nazwashop dan FA beautystore. Terimakasih atas dukungannya selama ini.
14. Rekan-rekan EU Fashion Mega Mall Metro, Metro Raya, Nonik, Leni metro, Sumber Batik, Mitra Gumelar, Gumelar, Alif Fashion, Gendis Shop, CNC Batik, Asward Collection, Eli Kerudung, Damai Abadi, PakDE Fashion. Terimakasih atas dukungannya dan pembelajarannya selama ini, semoga kita semua akan sukses bersama.
15. Rekan-rekan ROIS FEB UNILA, Eri, Pina, Elsyia, Ruli, Anisya, Kiki, Indah, Uswatun, Nia, Agnes, Ani, Rita, Deddy, Umar, Bang Febri, Bang Wisnu, Mbak Zahрати, Mbak Indah, Mbak Isti Farida, Mbak Astri, Mbak Rova, serta rekan-rekan lainnya. Terimakasih atas pembelajaran pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa yang kalian berikan.
16. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2015, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama kita kuliah bersama.

17. Keluarga KKN Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Pringsewu
Periode I Januari-Februari 2018. Mega, Ira, Ika, Zhafran, Rizki, dan Yosep.
Terimakasih atas pengalaman berharga dan telah menjadi keluargaku di desa
tempat kita mengabdikan. *See you on top.*

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan, dan semoga
skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 25 April 2022
Penulis,



Farida Aliyatul Asy'ariati

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teoritis	12
2.1.1 Pembangunan Ekonomi	12
2.1.2 Ketimpangan Wilayah.....	13
2.1.3 Indeks Williamson	15
2.1.4 PDRB Perkapita	19
2.1.5 Rata-rata Lama Sekolah	20
2.1.6 Penduduk.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Kerangka Pemikiran	23
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Data dan Ruang Lingkup Penelitian	25
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	25
3.2.1 Ketimpangan Wilayah.....	25
3.2.2 PDRB Perkapita	26
3.2.3 Jumlah Penduduk Miskin	26
3.3 Metode Analisis Data.....	26
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Ketimpangan Wilayah Kabupaten Kota Sebelum Covid-19	27
4.2 Ketimpangan Wilayah Kabupaten Kota Selama Covid-19.....	29
4.3 Pembahasan.....	31
4.3.1 PDRB Perkapita	31
4.3.2 Rata-rata Lama Sekolah	33
4.3.3 Jumlah Penduduk	34
4.4 Implikasi Kebijakan	38
V. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	40

5.2 Saran.....40

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. PenelitianTerdahulu	24
2. Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota di Lampung Sebelum Covid-19.....	27
3. Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota di Lampung Selama Covid-19	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Ketimpangan Wilayah di Sumatera Tahun 2020 (indeks)	2
2. Ketimpangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018-2020.....	3
3. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	7
4. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	9
5. Kerangka Pemikiran.....	24
6. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Lampung Sebelum dan Selama Covid-19.....	33
7. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Lampung Sebelum dan Selama Covid-19.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Indeks Williamson Kabupaten Kota di Provinsi Lampung.....	L1
2. Data Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kota di Provinsi Lampung	L2
3. Data Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kota di Provinsi Lampung.....	L3
4. Perhitungan Indeks Williamson.....	L4

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan suatu negara. Secara agregat pertumbuhan ekonomi dilihat melalui pencapaian nilai total Produk Domestik Bruto atau PDB suatu negara. Dalam komponen pertumbuhan itu sendiri, Todaro & Smith (2015) membagi tiga komponen penting pertumbuhan ekonomi, pertama adalah akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketrampilan kerja. Kedua, pertumbuhan jumlah penduduk yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi atau cara-cara baru menyelesaikan pekerjaan.

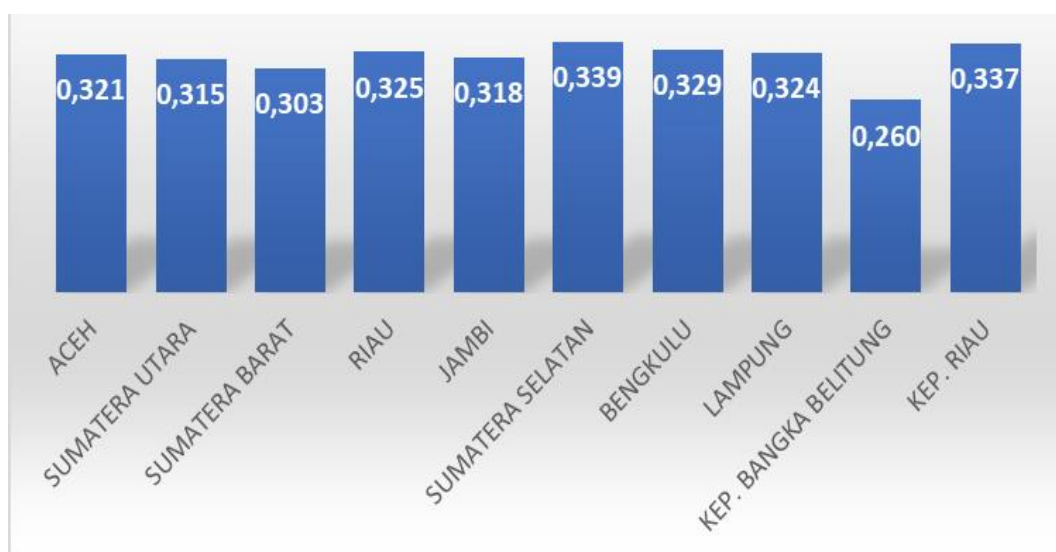
Meskipun pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pembangunan suatu negara, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan, pengurangan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2015). Secara singkat, pembangunan bertujuan mensejahterakan warga masyarakat tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga non ekonomi.

Selain pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan (*income inequality*) juga menjadi isu penting bagi pembangunan setiap negara. Secara teoritis dan didukung oleh banyak penelitian empiris terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak pada ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan berkaitan dengan pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu negara. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan berarti distribusi pendapatan di masyarakat semakin tidak merata. Kondisi ini pada akhirnya akan memperbesar

kesenjangan (*gap*) antara masyarakat dengan tingkat ekonomi relatif baik (kelompok kaya) dengan mereka yang berpendapatan rendah (kelompok miskin).

Pertumbuhan ekonomi akan lebih bermakna apabila dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata yang sering kali diikuti dengan perubahan struktur pendapatan, terutama bagi negara yang sedang berkembang. Masalah dihadapi di Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat atau jumlah orang berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*) (Rycroft, 2018).

Ketimpangan wilayah yang besar (kesenjangan ekonomi) dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara sedang berkembang, tidak terkecuali di Indonesia (Rycroft, 2018). Meskipun Pulau Jawa merupakan pusat kegiatan, baik perekonomian maupun pemerintahan, nyatanya kondisi ini masih menimbulkan masalah pembangunan bagi dua provinsi tersebut dengan indeks ketimpangan wilayah yang masih tinggi.

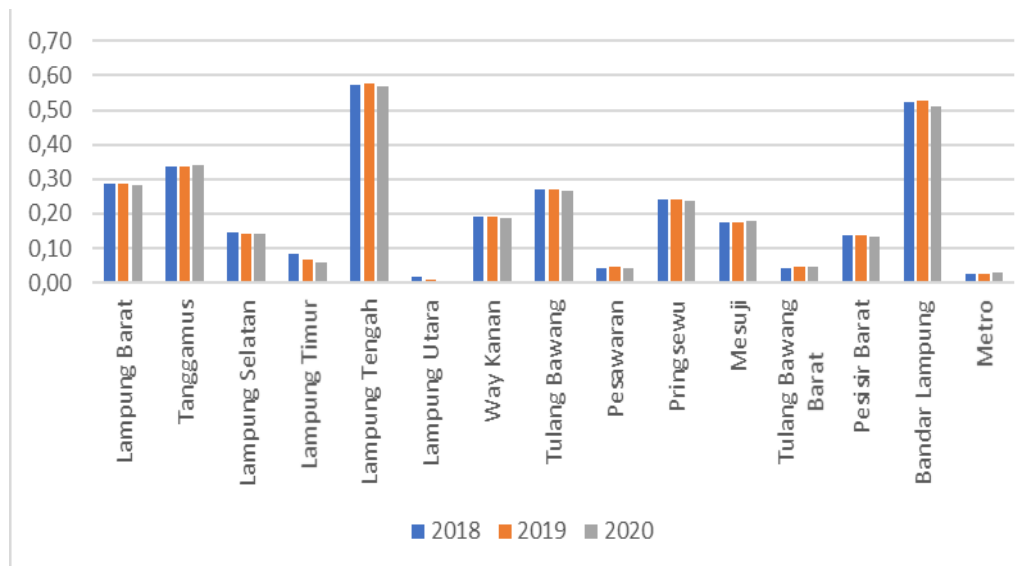


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 1. Ketimpangan Wilayah di Sumatera Tahun 2020 (indeks)

Kondisi wilayah Indonesia pada tahun 2020 sebesar 0,38 indeks, ketimpangan tertinggi di Pulau Sumatera adalah Sumatera Selatan yaitu sebesar 0,339 indeks sedangkan ketimpangan adalah Bangka Belitung yaitu sebesar 0,260 indeks. Provinsi Lampung berada di posisi urutan 5 tertinggi setelah Sumatera Selatan (0,339 indeks), Kepulauan Riau (0,337 indeks), Bengkulu (0,329 indeks) Riau

(0,325 indeks). Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan merupakan sebuah realita yang ada ditengah-tengah masyarakat dunia baik di negara yang maju maupun negara berkembang yang juga merupakan isu penting untuk di tinjau dan perlu adanya berbagai upaya dari pemerintah dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat, serta peningkatan taraf hidup masyarakat melalui berbagai macam usaha dalam rangka peningkatan dari berbagai macam aspek yang ada (Kalalo et al., 2016). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketidakmerataan terjadi di seluruh dunia, jadi masalah ini juga terdapat pada negara-negara yang sudah maju namun yang terjadi di negara-negara maju lebih kecil atau sudah tidak terlihat jelas dibandingkan yang terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2021

Gambar 2. Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018-2020

Selain itu, kondisi ketimpangan wilayah tidak bisa dilepaskan dari keadaan demografis dan ketenagakerjaan. Hasil penelitian Kalalo et al. (2016) menunjukkan bahwa penduduk merupakan salah satu penyebab meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan. Di lain sisi, meskipun penduduk membawa pengaruh yang tidak baik terhadap ketimpangan, dengan menekan dan mengupayakan tingkat pengangguran yang rendah ketimpangan diharapkan akan berkurang.

Permasalahan ketimpangan wilayah tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kemiskinan, biasanya terjadi pada negara miskin dan berkembang. Menurut Mankiw (2018), banyak negara sedang berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 1960-an mulai menyadari bahwa pertumbuhan yang semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Di negara-negara miskin yang menjadi perhatian utama adalah masalah pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Banyak orang merasakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi gagal untuk mengurangi bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan absolut di Negara Sedang Berkembang (NSB). Dengan kata lain, pertumbuhan GNP (*Gross National Product*) per kapita yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bahkan, pertumbuhan GNP per kapita di beberapa negara yang sedang berkembang (seperti India, Pakistan, Kenya) telah menimbulkan penurunan absolut dalam tingkat hidup penduduk miskin baik di perkotaan maupun pedesaan.

Ketimpangan pembangunan selama ini berlangsung dengan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek, dan dimensi. Seperti ketimpangan hasil pembangunan misalnya dalam hal pendapatan perkapita atau pendapatan daerah, dan ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Munculnya kawasan-kawasan slumps (kumuh) di tengah beberapa kota besar, serta sebaliknya hadirnya kantong-kantong pemukiman mewah di tepian kota atau bahkan di pedesaan adalah suatu bukti nyata ketimpangan yang terjadi. Perbedaan gaya hidup masyarakat merupakan bukti lain dari ketimpangan.

Apa yang disebut dengan proses "*trickle-down effect*" dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi. Sebagian besar NSB yang mengalami laju pertumbuhan relatif tinggi tidak membawa manfaat yang berarti bagi penduduk miskinnya. Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: pertama, kemiskinan absolut, di mana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan (Mudrajad, 1997).

Sebagai suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau, perbedaan karakteristik wilayah adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari oleh Indonesia. Karena karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, sehingga suatu kewajaran bila pola pembangunan ekonomi di Indonesia tidak seragam. Ketidakteragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada gilirannya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun pendapatan antar daerah.

Kondisi ini merupakan tantangan pembangunan yang harus kita hadapi mengingat masalah kesenjangan itu dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta dapat menyulitkan kita dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan pemerataan. Ketimpangan merupakan permasalahan klasik yang dapat ditemukan dimana saja. Oleh karena itu ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut tetap terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Ketidakpuasan dan kritik yang timbul dalam proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sehubungan dengan pertumbuhan yang telah dicapai akan tetapi karena perkembangan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut kurang mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, bahkan ketimpangan pendapatan semakin besar dan telah menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya pengangguran, kurangnya sarana kesehatan dan pendidikan, perumahan, kebutuhan pokok, rasa aman, dan lain-lain.

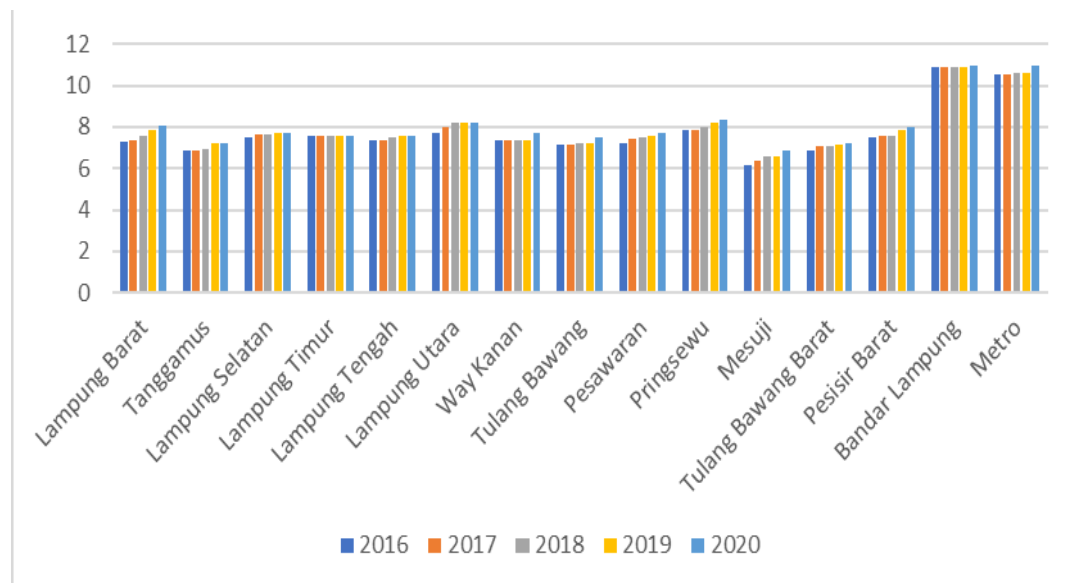
Hasil kajian Williamson (2018) menemukan bahwa 80 persen perbedaan pertumbuhan perekonomian antarnegara adalah disebabkan oleh faktor modal fisik dan modal manusia sedangkan 20 persen lagi sisanya karena faktor-faktor lain. Bila manusia mampu mengoptimalkan potensinya maka ia akan dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk kesejahteraan bersama. Manusia dapat mempunyai akses pada sumber daya ekonomi serta dapat memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesehatannya untuk bekerja agar dapat hidup dengan layak. Proses pembangunan harus dapat merealisasikan harapan-harapan

tersebut. Fokus pada manusia inilah yang melandasi konsep pembangunan manusia.

Tujuan utama dari pembangunan manusia harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (Conceicao, 2020). Pendekatan pembangunan manusia lebih memfokuskan pada perluasan pilihan masyarakat dengan bebas dan bermartabat. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat: pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Namun demikian, pembangunan harus seimbang antara membangun kemampuan dengan memanfaatkan kemampuan. Proses pembangunan setidaknya harus menciptakan lingkungan untuk manusia baik sebagai individu, keluarga maupun masyarakat, mengembangkan kemampuannya secara optimal sehingga mempunyai cukup kesempatan (memanfaatkan kemampuannya) untuk dapat hidup yang produktif dan kreatif sesuai kebutuhan dan minatnya. Dengan kata lain, pembangunan manusia tidak hanya terfokus pada pembentukan kemampuan manusia seperti kesehatan yang lebih baik serta pengetahuan dan keterampilan. Tetapi proses pembangunan manusia juga perlu mempertimbangkan pemanfaatan kemampuan tersebut baik untuk bekerja, berlibur, serta kegiatan sosial politik lainnya.

Dua sisi pembangunan tersebut harus berkembang secara seimbang. Ketimpangan akan berakibat pemborosan potensi manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua aspek kehidupan manusia. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk IPM. *United Nations Development Programme*

(UNDP) memperkenalkan IPM sejak tahun 1990. Dalam perjalanannya, UNDP telah beberapa kali melakukan revisi metode penghitungan IPM. Hingga tahun 2010 UNDP melakukan revisi yang cukup besar dengan menyebutnya sebagai era baru pembangunan manusia. Dalam metode baru ini dikenalkan indikator harapan lama sekolah yang menggantikan indikator melek huruf dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita (Conceicao, 2020).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2021

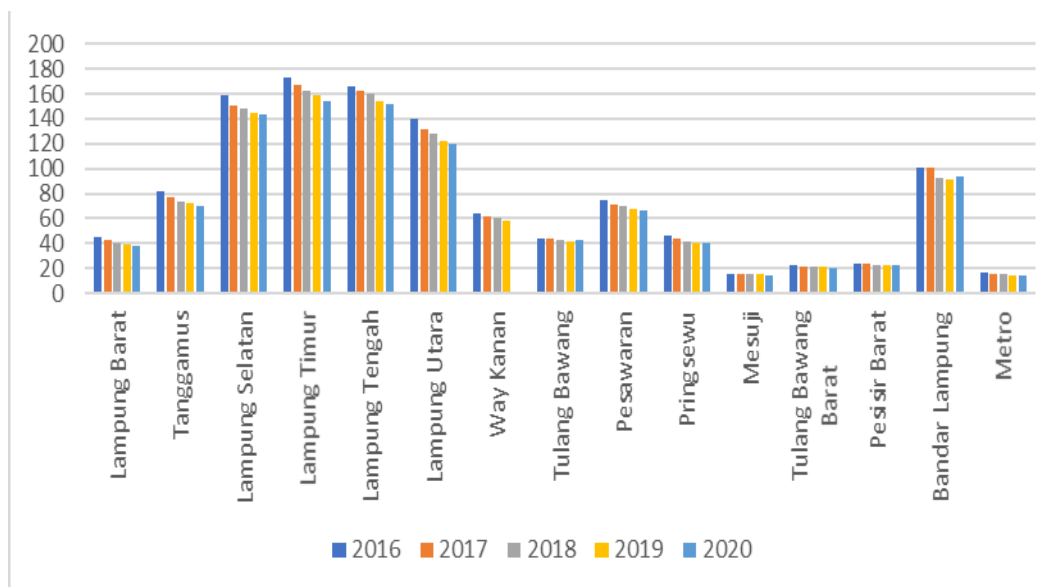
Gambar 3. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Peningkatan indikator rata-rata lama sekolah (RLS) provinsi juga tercermin dari indikator RLS kabupaten/kota. Penduduk Kota Metro dan Kota Bandar Lampung yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata telah mengenyam hampir 11 tahun masa sekolah. Dengan kata lain, pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di wilayah kedua kota tersebut relatif sudah terpenuhi. Selanjutnya diikuti Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat yang baru mencapai rata-rata setingkat kelas 2 SMP, sementara kabupaten lainnya hanya setingkat kelas 1 SMP. Bahkan di Kabupaten Mesuji RLS penduduk kurang dari tujuh tahun atau setara dengan baru menamatkan sekolah dasar.

Sejarah mencatat bahwa ketersediaan SDM yang terdidik merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan negara-negara maju. Pendidikan menjadi sebuah tolok ukur suatu daerah dalam menciptakan SDM yang mampu bersaing secara global. Karena itu, tidaklah mengherankan hampir semua negara menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional mereka (Mankiw, 2019). Sejumlah sumber menyebutkan Finlandia sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia sejak tahun 2000. Heriyanto (2019) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung Tahun 2013-2017.

Potret pembangunan sumber daya manusia masih terlihat rendah kualitasnya. Penduduk miskin di Provinsi Lampung pada September 2020 tercatat mencapai 1,09 juta orang atau sebesar 12,76 persen dari total penduduk. Jumlahnya bertambah sebanyak 41,82 ribu orang dibanding kondisi Maret 2020 yang mencapai 1,05 juta orang (12,34 persen). Sumber daya manusia Provinsi Lampung tahun 2020 yang tercermin dari angka indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 69,69 masih berstatus “sedang”. Walaupun Indeks Ketimpangan Gini Rasio sebesar 0,320 pada September 2020 menunjukkan kondisi yang lebih baik dari Indonesia sebesar 0,399. Tingkat ketimpangan antarwilayah yang rendah belum tentu merefleksikan keberhasilan kebijakan distribusi pembangunan. Tingkat ketimpangan yang rendah bisa jadi mencerminkan tingkat pembangunan yang rendah dan merata di seluruh wilayah. Sebaliknya ketimpangan yang terlalu tinggi bisa berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi, memperlambat pengentasan kemiskinan.

Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak menjadi masalah selama produktivitas penduduk daerah yang bersangkutan juga tinggi sehingga tidak menyebabkan distribusi pendapatan timpang. Permasalahan akan muncul ketika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang akan berakibat pada ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu jumlah penduduk muda dan tua juga akan berpengaruh pada produktivitas penduduk. Rasio dependensi yang tinggi akibat besarnya jumlah penduduk usia muda dan tua juga akan memengaruhi kondisi ekonomi suatu wilayah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2020

Gambar 4. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Todaro & Smith (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk biasanya memicu timbulnya masalah lain seperti struktur umur muda, jumlah pengangguran yang semakin lama semakin tinggi, urbanisasi dan lain sebagainya. Todaro & Smith (2006), juga menambahkan bahwa masalah kependudukan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang, baik dilihat dari sisi antar pulau, antar daerah, maupun antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan, serta antar sektor. Hasil penelitian Kalalo et al., (2016) menunjukkan bahwa populasi penduduk menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk akan berpengaruh pula pada ketimpangan distribusi pendapatan apabila tidak ada kenaikan produktivitas tenaga kerja

Di era Otonomi Daerah sekarang ini, dimana setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola potensi daerah yang dimilikinya secara tepat sehingga akan mendorong terciptanya proses pembangunan dengan tingkat pemerataan yang baik dan disertai pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Dengan demikian ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya serta pendapatan antar golongan ataupun daerah akan semakin menurun. Provinsi Lampung sebagai bagian dari perekonomian

nasional, dan mempunyai struktur ekonomi yang relatif sama maka strategi dan kebijakan pembangunan yang harus diterapkan pun relatif sama.

Berdasarkan data BPS dalam proyeksi penduduk Lampung tahun 2010-2035 jumlah penduduk Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, banyaknya jumlah penduduk menunjukkan keberhasilan dalam bidang kesehatan yang diukur dengan indikator antara lain angka harapan hidup ditinjau menurut wilayah kabupaten/kota angka harapan hidup mengalami peningkatan setiap tahunnya dapat diartikan bahwa derajat kesehatan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Lampung relatif membaik, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan di suatu kabupaten/kota Provinsi Lampung, tingkat harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah yang tergolong relatif baik dapat menciptakan tenaga kerja sesuai dengan keahlian masing-masing tenaga kerja sehingga akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, namun hal tersebut hanya mengelompok pada daerah-daerah pusat aktivitas ekonomi, terutama pada daerah perkotaan dan industri atau daerah yang berpendapatan tinggi saja sehingga menyebabkan pertumbuhan yang tidak merata dan mengakibatkan terjadinya kesenjangan ekonomi seperti pada Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, dan sebagian Tanggamus menghadapi kesulitan mengembangkan wilayahnya, terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas wilayah. Kawasan perbukitan dengan kemiringan lereng yang curam semakin membatasi akses penduduk, baik terhadap pusat-pusat perekonomian maupun terhadap pelayanan dasar lainnya.

Permasalahan ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung menjadi salah satu permasalahan yang harus dicari solusinya, hal tersebut dapat dilihat dalam salah satu misi Provinsi Lampung “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah”. Melihat dari kondisi Provinsi Lampung tersebut, dapat dikatakan pemerintah telah melakukan upaya dalam mengurangi tingkat ketimpangan, namun saat ini, ketimpangan tersebut masih terjadi. Untuk itu penelitian ini berupaya untuk menganalisis ketimpangan wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang disajikan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketimpangan wilayah kabupaten/kota sebelum dan selama pandemi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat ketimpangan wilayah kabupaten kota sebelum dan selama pandemi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Peneliti untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian dibidang yang sama di masa yang akan datang.
2. Para pengambil kebijakan sebagai bahan dalam mengambil keputusan sehingga dapat merencanakan dan mengatur kebijakan yang paling baik untuk mengentaskan ketimpangan wilayah khususnya di kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Todaro & Smith (2015) menjelaskan bahwa pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional; serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Lebih lanjut, Todaro & Smith (2015) menjelaskan tiga tujuan inti pembangunan yaitu:

- a) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan yang pokok, seperti pangan sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
- b) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- c) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau bangsa-bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Pendapat yang sama diutarakan oleh Amartya Sen dalam Todaro & Smith (2015) bahwa “kapabilitas untuk berfungsi (*capabilities to function*)” adalah yang paling menentukan status miskin-tidaknya seseorang. Dari apa yang telah dijelaskan, pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya tidak dapat dianggap sebagai tujuan akhir. Pembangunan haruslah lebih memperhatikan peningkatan kualitas

kehidupan dan kebebasan.

2.1.2 Ketimpangan Wilayah

Kesenjangan atau ketimpangan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan (Baidhawry, 2015). Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi karena kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara berkembang (Jhingan, 1999). Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat istilah daerah maju dan daerah terbelakang (Andiny & Mandasari, 2017).

Menurut Alam & Tjahya (2007) menyatakan bahwa ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut.

North (1955) memunculkan ketimpangan antar wilayah dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori ini dimunculkan sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa tersebut dikenal sebagai hipotesa Neo Klasik. Menurut hipotesa Neo Klasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan cenderung mengalami peningkatan terus-menerus. Hal ini akan terus terjadi sehingga ketimpangan mencapai titik puncak. Apabila proses pembangunan berlanjut, maka ketimpangan pembangunan akan mengalami penurunan. Berdasarkan hipotesa ini, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi pada negara yang sedang berkembang, dan akan terjadi sebaliknya pada negara yang maju. Dengan kata lain kurva ketimpangan pembangunan berbentuk kurva U-terbalik.

Kebenaran hipotesa Neo Klasik ini diuji oleh Williamson (2018) melalui studi ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan sedang berkembang menggunakan data time series dan cross section. Hasilnya adalah hipotesa Neo Klasik terbukti benar secara empirik. Berarti proses pembangunan suatu negara tidak langsung dapat menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah, akan tetapi pada tahap pertama justru terjadi hal yang sebaliknya (Syafrizal, 2012:102). Menurut Williamson hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu.

Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Menurut Kuncoro, konsep entropi Theil dari distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan indeks entropi menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional dan distribusi produk domestik bruto dunia. Untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto propinsi, Ying menggunakan indeks ketimpangan regional. Indeks ketimpangan regional Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua subindikasi yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antarwilayah atau regional (Ying, 2000: 60).

Dengan menggunakan alat analisis indeks entropi Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung. Indeks ketimpangan entropi Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu. Indeks ketimpangan entropi Theil juga dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu, sedang yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan/ ketimpangan spasial. Sebagai contoh kesenjangan/ ketimpangan antar daerah dalam suatu negara dan antar sub unit daerah dalam

suatu kawasan (Kuncoro, 2001: 87).

Simon Kuznet mengemukakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap berikutnya distribusi pendapatan akan mengalami peningkatan. Observasi ini yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik” karena perubahan longitudinal (*time-series*) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznet dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan secara modern. Hipotesis tersebut berawal dari peryumbuhan ekonomi yang awalnya meningkat pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah sampai tingkat pertumbuhan tertentu mengalami penurunan. Kuznet menyatakan bahwa diantara faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pola U adalah kelompok pendapatan tinggi dan adanya pergeseran penduduk dari sektor pertanian tradisional ke sektor industri modern.

Terjadinya ketimpangan antar wilayah juga dijelaskan Myrdal, yaitu membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya disekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskannya menggunakan *spread effect* dan *backwash effect* sebagai pengaruh penjalaran dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. *Spread effect* artinya sebagai suatu pengaruh yang mendatangkan keuntungan, mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi dipusat pertumbuhan ke daerah sekitar. *Backwash effect* artinya sebagai pengaruh yang mendatangkan kerugian, mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar atau pinggiran termasuk aliran modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk mengimbangi perkembangan wilayah inti.

2.1.3 Indeks Williamson

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar kabupaten yang terjadi pada Provinsi Lampung, dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional in equality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson. Perhitungan Ketimpangan Untuk mengetahui perhitungan ketimpangan pendapatan maka digunakan Indeks Williamson (Williamson, 1965).

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y}$$

Keterangan:

Dimana IW adalah Indeks Williamson, yi adalah PDRB perkapita di Kabupaten/ Kota i, y adalah PDRB perkapita rata-rata Provinsi Lampung, fi adalah jumlah penduduk di kabupaten/kota I, dan n adalah jumlah penduduk Provinsi Lampung.

Penyebab Ketimpangan Wilayah Williamson (1965)

1) Migrasi Tenaga Kerja

Migrasi tenaga kerja antardaerah kemungkinan akan sangat selektif karena biaya migrasi yang mahal pada tingkat pendapatan yang rendah atau inersia tradisional di daerah Selatan yang miskin dan tidak terindustrialisasi. Para migran dapat dicirikan sebagai orang yang bersemangat dan berwirausaha, berpendidikan dan terampil, dan berusia produktif. (kami tidak menggambarkan karakteristik dominan emigran dari Selatan yang terbelakang, tetapi menyarankan bahwa karakteristik ini akan lebih umum di antara para migran daripada di antara populasi usia rata-rata di wilayah selatan).

Migrasi selektif jenis ini jelas menonjolkan kecenderungan menuju divergensi pendapatan daerah: tingkat partisipasi tenaga kerja, ceteris paribus, akan cenderung naik di daerah kaya dan turun di daerah miskin; lebih jauh lagi, modal manusia yang berharga akan cenderung mengalir keluar dari Selatan dan ke Utara, membuat sumber daya regional per kapita semakin tidak seimbang dan ketidakseimbangan geografis semakin parah. Apa yang telah dikatakan di atas tentang pola migrasi pada tahap perkembangan awal hampir tidak orisinal dalam penelitian ini. Ini muncul sebagai salah satu penopang teoretis yang penting untuk pengoperasian kedua efek *backwash* Myrdal dan efek polarisasi Hirschman: Alih-alih menyerap pengangguran yang terselubung, kemajuan Utara dapat menggunduli Selatan dari teknisi dan manajer kuncinya serta para pemuda yang lebih giat. Dengan demikian, perbedaan upah aktual antara Utara dan Selatan kemungkinan besar akan terlalu menonjolkan perbedaan produktivitas nyata di kelas yang paling produktif dan terampil. Selain itu, tentu saja, mobilitas paling tinggi di jalur yang sama ini sehingga hampir pasti bahwa Selatan akan kalah dari Utara terlebih dahulu dan terutama orang-orangnya yang lebih berkualitas.

Untuk menggambarkan potensi efek disequilibrasi dari migrasi tenaga kerja antardaerah, Eckaus telah mencirikan pola migrasi selama tahap awal perkembangan industri Italia persis seperti ini, meskipun pendapatnya tidak dipertahankan secara empiris: Abad kesembilan belas adalah masa emigrasi yang luar biasa, umumnya lebih berat di Selatan, di mana pada beberapa waktu dan tempat melebihi penambahan penduduk secara alami. Konsentrasi imigran di usia yang lebih muda dan produktif meninggalkan Selatan dengan kualitas tenaga kerja yang memburuk. Dziewonski menyajikan kepada kita contoh kontemporer tentang efek buruk migrasi antar regional pada tingkat pembangunan nasional yang rendah. Dia telah mencatat bahwa pemerintah Polandia telah sengaja meminimalkan migrasi tenaga kerja antardaerah, karena perencana pusat prihatin dengan efek masa lalu yang telah berkontribusi lebih lanjut terhadap ketidaksetaraan regional dan dualisme melalui efek pada tingkat partisipasi relatif dan kualitas angkatan kerja. Ini, juga, tampaknya konsisten dengan gagasan bahwa pada tahap awal pertumbuhan, arus tenaga kerja antardaerah dapat menghasilkan ketidaksetaraan spasial lebih lanjut daripada menguranginya. Ini tampaknya mengikuti fakta bahwa Polandia belum mencapai tahap pertumbuhan yang matang.

2) Migrasi Modal

Aliran modal swasta antar daerah juga cenderung menyimpang. Ekonomi eksternal dan keuntungan umum yang diperoleh dari aglomerasi proyek-proyek modal di Utara yang relatif kaya dapat menyebabkan perpindahan modal dari Selatan ke Utara, cenderung mempercepat ketidaksetaraan regional dan memperlebar kesenjangan Utara-Selatan. Premi risiko tinggi, kurangnya keterampilan kewirausahaan, dan pasar modal yang belum matang dapat semakin menekan aktivitas investasi dan akumulasi modal di Selatan. Akhirnya, perkembangan lembaga keuangan yang belum matang, mungkin terbukti tidak hanya penting tetapi juga yang paling mudah diukur dari faktor-faktor ini dalam menjelaskan arus modal yang menyimpang. Spanyol bisa menjadi contoh kita di sini:

“Karakter campuran, komersial dan industri, dan sangat oligopolistik. Tujuh bank

menangani lebih dari tujuh puluh persen dari total pinjaman. Akibatnya, simpanan daerah tertinggal diubah menjadi kredit untuk industri di utara, terutama untuk industri di mana bank berpartisipasi. Tetapi modal juga bermigrasi melalui pasar modal, karena keuntungan lebih pasti dan lebih tinggi di sektor industri maju negara tersebut. Sebagian besar investasi langsung oleh pengusaha dari Selatan juga dilakukan di daerah maju. Pengaturan infrastruktur yang lebih baik, fasilitas transportasi dan komunikasi yang unggul, dan pasar yang lebih besar semuanya berperan.”

Bukti aliran modal swasta antardaerah yang berbeda juga tidak diisolasi dari negara-negara Eropa yang terbelakang. Pola yang sama tampaknya terjadi di Pakistan, dengan arus modal yang besar dari Pakistan Timur ke Barat, dan di Indonesia, dengan arus yang sama dari pulau-pulau terluar ke pusat. Dan, tentu saja, dengan akumulasi bukti bahwa arus modal sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan (permintaan modal), "kelangkaan" modal di Selatan tidak selalu berarti produktivitas marjinal yang tinggi dan harga yang tinggi.

3) Kebijakan Pemerintah Pusat

Niat terbuka atau tidak sadar pemerintah nasional atau federal untuk memaksimalkan pembangunan nasional mungkin cenderung semakin meningkatkan tingkat ketidaksetaraan regional jika ekspresi politik aktif di Selatan kurang (seperti pada periode konstruksi Amerika pasca Perang Saudara) atau bahkan meskipun ekspresi seperti itu. Secara terbuka, pemerintah pusat dapat mengalokasikan investasi ke Utara, di mana "tuntutan mendesak untuk beberapa jenis investasi publik padat modal muncul," yang mendukung kawasan industri yang tumbuh cepat dan membantu menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat di sana, hanya untuk menciptakan kebutuhan modal overhead sosial yang besar di masa depan. Ini adalah argumen umum dalam gudang sejarah apologis Selatan di Italia dan Amerika Serikat untuk menjelaskan kelambatan relatif dalam perkembangan industri Selatan. Dengan cara yang tidak terlalu terbuka tetapi sama pentingnya, pemerintah pusat dapat memanipulasi ketentuan perdagangan eksternal demi industri Utara. Kebijakan tarif nasional yang dilaksanakan dengan maksud untuk mendorong dan melindungi perkembangan industri, yang umum

bagi sebagian besar negara terbelakang dulu dan sekarang, jelas melibatkan transfer geografis ke wilayah utara yang kaya. Para senator dan perwakilan selatan di Amerika Serikat tentu menyadari hal ini dan sangat mementingkan pengaruhnya selama tiga atau empat dekade sebelum Perang Saudara ketika suara mereka penting dalam pembuatan kebijakan Amerika.

4) Keterkaitan Antar Wilayah

Secara lebih umum, mungkin ada kekurangan keterkaitan antar W pada tahap awal pertumbuhan nasional, sehingga efek penyebaran perubahan teknologi, perubahan sosial, dan pengganda pendapatan diminimalkan. Bagian dari proses pertumbuhan nasional hanyalah penyatuan ekonomi pasar regional. Sejauh hubungan antardaerah seperti itu lambat berkembang, pembangunan nasional kemungkinan besar akan diregionalisasikan pada tahap awal pertumbuhan. Lebih jauh lagi, jika Utara memiliki wilayah pertanian yang luas dan produktif, "Selatan akan terputus dari kontak yang menguntungkan dengan pembangunan Utara, sementara tetap terkena efek polarisasi yang merugikan." Faktor ini akan membantu menjelaskan masalah yang relatif parah di Utara- Dualisme Selatan yang bertahan, misalnya, dalam sejarah Nordeste Brasil, Oriente Kolombia, Mezzogiorno Italia, dan Selatan AS.

2.1.4 PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik adalah sebagai jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah domestik. Atau merupakan jumlah hasil seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tertentu dan dalam suatu periode tertentu (setahun) yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu negara atau suatu daerah, ada dua cara dalam penyajian PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

- 1) PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dan digunakan untuk

mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi dan struktur daerah ekonomi suatu daerah.

- 2) PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dapat dihitung menggunakan harga barang yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

2.1.5 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi tentang: partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun (standar *United Nations Development Programme*).

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindaknya. Tobing (dalam Hastarini, 2005), mengemukakan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah.

2.1.6 Penduduk

Badan Pusat Statistik (2011) mendefinisikan penduduk adalah semua orang yang

berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Purba (2012) mengatakan penduduk adalah orang yang mantranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Simanjuntak (2012) mengatakan penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara.

Bertambahnya penduduk justru akan menciptakan/memperbesar permintaan secara keseluruhan, terutama untuk investasi. Pertambahan penduduk itu tidak sekedar sebagai tambahan penduduk melainkan juga sebagai suatu kenaikan dalam daya beli (*purchasing power*). Oleh karena itu apabila terjadi penurunan jumlah penduduk, maka akan menyebabkan turunnya rangsangan untuk mengadakan investasi sehingga mengakibatkan permintaan juga akan turun. Jika perkembangan penduduk tertunda maka akan mempunyai perkiraan bahwa pasar akan semakin sempit. Namun sebaliknya, jika penduduk tidak berkualitas, maka perkembangan penduduk yang cepat justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Oleh karena itu adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut adanya pembangunan ekonomi yang terus menerus.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Chrisamba & Saraswati (2016)	Ketimpangan, jumlah penduduk dan GDP perkapita	OLS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan GDP perkapita mampu mendorong peningkatan ketimpangan.
2.	Nita Tri Hartini, (2017)	PDRB Per kapita, Investasi, IPM dan ketimpangan	FEM	Variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Variabel Investasi dan

			Variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan
3.	Andiny & Mandasari (2017)	Ketimpangan, Pertumbuhan ekonomi, Inflasi, Jumlah Penduduk	FEM Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan.
4.	Susi Lestari (2016)	Pertumbuhan ekonomi, Inflasi Jumlah Penduduk	<i>Ordinary Least Squares</i> Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin akan berdampak positif ketimpangan pendapatan
5.	Muhammad Hasan dan Annur Fitriani Idris (2016)	Ketimpangan, Pertumbuhan ekonomi, Jumlah penduduk miskin 3. Inflasi	<i>Ordinary Least Squares</i> Hasil menunjukkan Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan sedangkan Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan.
6.	Muhammad Arif & Rossy Agustin Wicaksani (2017)	Ketimpangan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan ekonomi, Tenaga kerja, dan Jumlah penduduk.	REM Hasil menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan sedangkan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan jumlah penduduk tidak berpengaruh

			signifikan.
7.	Sima Siami-Namini dan Darren Hudson (2018)	Ketimpangan, Inflasi, GDP Per kapita, pengangguran, urbanisasi dan keterbukaan terhadap perdagangan internasional	<i>Ordinary Least Squares</i> Hasil menunjukkan bahwa ada hubungan negative abatar inflasi dan ketimpangan, sedangkan GDP perkapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan.

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

2.3 Kerangka Pemikiran

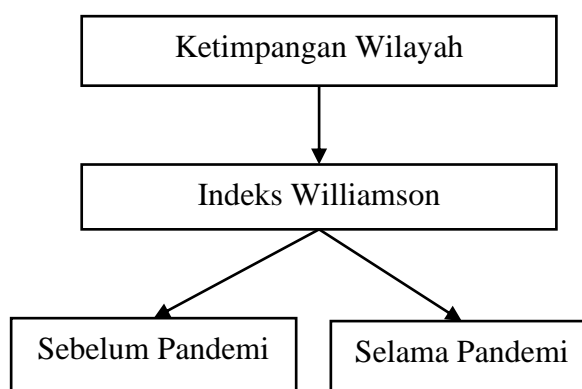
Menurut Williamson hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Menurut Kuncoro, konsep entropi Theil dari distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan indeks entropi menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional dan distribusi produk domestik bruto dunia. Untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto propinsi,

Ying menggunakan indeks ketimpangan regional. Indeks ketimpangan regional Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua subindikasi yaitu ketimpangan regional dalam 10 wilayah dan ketimpangan regional antarwilayah atau regional (Ying, 2000). Dengan menggunakan alat analisis indeks entropi Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung. Indeks ketimpangan entropi Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu. Indeks ketimpangan entropi Theil juga dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan berguna untuk

menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu, sedang yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan/ ketimpangan spasial. Sebagai contoh kesenjangan/ ketimpangan antar daerah dalam suatu negara dan antar sub unit daerah dalam suatu kawasan (Kuncoro, 2001: 87).

Selain itu akibat sering terkonsentrasinya pada pembangunan perekonomian di daerah maka kemiskinan yang muncul akibat ketimpangan antara si kaya dan si miskin semakin terlihat jelas. Setinggi apapun tingkat pendapatan nasional per kapita jika tidak diimbangi pemerataan distribusi pendapatan, maka tingkat kemiskinan akan terus meningkat. Akan tetapi jika pemerataan pendapatan sudah sangat baik sedangkan tingkat pendapatan nasional tidak mengalami peningkatan berarti prestasi kegiatan ekonomi tidak semakin membaik.

Wahyuni dan Monika (2016) yang menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan wilayah suatu daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Anshari, dkk (2018) bahwa rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah yang dapat diindikasikan bahwa pendidikan tidak selalu mempengaruhi ketimpangan wilayah. David Ricardo (1917) berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar hingga 2 kali lipat bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum (*subsistence level*).



Gambar 5. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif yaitu menjelaskan hubungan antar data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan data *time series* dari tahun 2016-2019 (sebelum covid-19) dan 2020-2021 (selama covid-19).

Dalam penelitian ini meneliti 13 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Lampung. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, buku bacaan dan sumber dari media *online* sebagai referensi yang dapat menunjang penulisan ini. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang digunakan untuk menghitung ketimpangan wilayah (indeks williamson), alaha PDRB perkapita dan jumlah penduduk miskin.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap variable yang akan dianalisis dalam penelitian ini, berikut penjelasan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

3.2.1 Ketimpangan Wilayah

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar kabupaten yang terjadi pada Provinsi Lampung, dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional in equality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson. Perhitungan Ketimpangan Untuk mengetahui perhitungan ketimpangan pendapatan maka digunakan Indeks Williamson (Kuncoro, 2004:104).

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y}$$

Keterangan:

Dimana IW adalah Indeks Williamson, yi adalah PDRB perkapita di Kabupaten/Kota i, y adalah PDRB perkapita rata-rata Provinsi Lampung, fi adalah jumlah penduduk di kabupaten/kota I, dan n adalah jumlah penduduk Provinsi Lampung.

Data PDRB perkapita di Kabupaten/Kota, PDRB perkapita rata-rata Provinsi Lampung, jumlah penduduk di kabupaten/kota, jumlah penduduk Provinsi Lampung yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik.

3.2.2 PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik adalah sebagai jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah domestik. Atau merupakan jumlah hasil seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah yang dihitung dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

3.2.3 Jumlah Penduduk

Badan Pusat Statistik (2011) mendefinisikan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Bertambahnya penduduk justru akan menciptakan/memperbesar permintaan secara keseluruhan, terutama untuk pembagi PDRB perkapita.

3.3 Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif kuantitatif dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan bantuan alat analisis Microsoft Excel 2010. IW sebelum pandemi 2016-2019 dan selama pandemic 2020-2021.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Williamson kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebelum pandemi covid-19 mengalami peningkatan. Indeks Williamson kabupaten/kota di Provinsi Lampung sepanjang periode tahun 2016-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nilai indeks pada tahun 2016 sebesar 0,26 meningkat menjadi 0,28 di tahun 2017, 2018 dan 2019 mencapai 0,32, sedangkan ketimpangan wilayah tahun 2020 juga mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 0,27. Secara teoritis, angka kesenjangan tersebut masih berada pada tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah yang rendah (kurang dari 0,35). Kondisi ini tidak lepas dari adanya pengaruh kebijakan pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan beberapa saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Perlunya melakukan upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui sektor pendidikan karena akan berdampak pada penurunan ketimpangan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
- 5.2.2 Perlunya menurunkan jumlah penduduk miskin dengan cara melakukan kebijakan dalam mengatur pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat memengaruhi peningkatan pada jumlah penduduk miskin sehingga akan berdampak pada penurunan jumlah ketimpangan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, R. H., & Tjahya, E. (2007). Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *The World Bank Office Jakarta*.
- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(2), 196–210.
- Baidhaw, Z. (2015). Kemiskinan dan Kritik Atas Globalisme Neo-Liberal. In *LP2M IAIN Salatiga*.
- Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. In *John Wiley & Sons Ltd* (3th ed., Vol. 5, Issue 7). John Wiley & Sons Ltd. <https://doi.org/10.3109/00498257509056115>
- Conceicao, P. (2020). *Human Development Report 2020*. http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/UGA.pdf
- Gujarati, D. N., & Porter, D. . (2009). Single-equation regression models. In *Introductory Econometrics: A Practical Approach* (5th ed.). Douglas Reiner.
- Heriyanto. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Lampung Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Kalalo, T., Engka, D. S. M., & Maramis, M. T. B. (2016). Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(01), 818–830.
- Mankiw, N. G. (2018). Principles of Microeconomics. *Cengage Learning*.
- Mankiw, N. G. (2019). Macroeconomics, 10th Edition. In *Worth Publishers*.
- North, D. C. (1955). Location Theory and Regional Economic Growth. *Journal of Political Economy*, 63(3), 243–258. <https://doi.org/10.1086/257668>
- Raafi'i, A., Hakim, D. B., & Putri, E. I. K. (2018). Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Pengembangan di Provinsi Papua Barat. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 2(3), 244. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.3.244-257>
- Rycroft, R. S. (2018). The Economics of Inequality, Discrimination, Poverty, and Mobility. In *Routledge*. <https://doi.org/10.4324/9781315699929>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). Economic development 8th edition. In *Manila, Philippines: Pearson South Asia Pte. Ltd.*

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development. In *Pearson*.
<https://doi.org/10.26417/ejes.v3i1.p133-142>
- Williamson, S. D. (2018). *Macroeconomics Sixth Edition* (Sixth Edit). Pearson Education Limited. www.pearsonglobaleditions.com
- Zaman, K., Khan, M. M., Ahmad, M., & Ikram, W. (2010). An empirical analysis of growth, inequality and poverty triangle in pakistan: Cointegration approach (1964-2006). *International Research Journal of Finance and Economics*, 46, 32–46.